

PENGARUH GOOD GOVERNANCE TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TATA KOTA DI KOTA MANADO

Helly Kolondam

Abstrak : *Tidak semua masyarakat tahu bahwa pemerintah memiliki landasan mengenai prinsip good governance yakni akuntabilitas dan transparansi tersebut. ternyata ini diharapkan bukan hanya sekedar goresan tinta diatas kertas saja, tapi implementasi dari apa yang dibuat pemerintah kiranya dapat dirasakan, karena seperti yang dikutip diatas bahwa akuntabilitas dan transparansi belum dilaksanakan secara menyeluruh oleh pemerintah. Tujuan penelitian untuk menjelaskan pengaruh good governance terhadap mengimplementasikan kebijakan tata kota di kota Manado.*

Penelitian ini dilakukan sebagai suatu riset deskriptif yang bersifat eksploratif dengan adanya pendekatan observasi secara langsung yakni pengamatan secara langsung di tempat penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah para aparatur pemerintah di Dinas Tata Kota berjumlah 63 orang dan untuk menghindari adanya subjektivitas terhadap variable dalam penelitian ini, maka peneliti melibatkan konsumen dalam hal ini masyarakat sebanyak 12 orang sehingga jumlah seluruhnya menjadi 75 orang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis statistic deskriptif dan Analisis statistic inferensial.

Hasil peneltian besarnya pengaruh good governace terhadap implementasi kebijakan menggunakan nilai koefisien determinasi. Hasil perhitungan persamaan regresi linier sederhana diperoleh persamaan $Y = 23.036 + 0.377X$. persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta Y sebesar 23.036, artinya jika tidak menggunakan atau menerapkan good governance dapat dijelaskan bahwa penerapan good governance dinaikkan sebesar satu satuan atau 100%, maka akan terjadi peningkatan keberhasilan implementasi kebijakan sebesar nilai koefisien regresi yaitu 0.377 atau 37,7%.

Kata Kunci : Good Governance, Implementasi Kebijakan

PENDAHULUAN

Dindonesia Good governance mulai dikenal secara lebih dalam kurang lebih tahun 1990 sebagai wacana penting yang muncul dalam berbagai pembahasan, diskusi, penelitian, dan seminar, baik di lingkungan pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat termasuk lingkungan para akademisi. Sejak terjadinya krisis moneter dan krisis kepercayaan yang mengakibatkan perubahan dramatis pada tahun 1998, Indonesia telah memulai berbagai inisiatif yang dirancang untuk mempromosikan good governance, akuntabilitas dan partisipasi yang lebih luas. Ini sebagai awal yang penting dalam menyebarluaskan gagasan yang mengarah pada perbaikan governance dan demokrasi di Indonesia. Good Governance dipandang sebagai paradigma baru dan menjadi cirri yang perlu ada dalam system

administrasi public. Secara umum good governance diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyrakat yang dilayani dan dilindunginya. Governance mencakup 3 (tiga) domain yaitu state (negara/pemerintahan), *private sectors* (sektor swasta/dunia usaha), dan *society* (masyarakat). Oleh sebab itu, Good Governance sektor publik diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan *stakeholders*), terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan berbagai sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas: keadilan, pemerataan, persamaan, efesiensi, transparansi dan akuntabilitas (*World Conference on Governance*, UNDP, 1999).

Ada beberapa prinsip *good governance* menurut UNDP (United Nation Development Programme), 1997 yaitu (1) partisipasi, (2) kepastian hukum, (3) transparansi, (4) tanggung jawab, (5) berorientasi pada kesepakatan, (6) keadilan, (7) efektifitas dan efisiensi, (8) akuntabilitas, (9) visi Strategik. Prinsip-prinsip itulah yang melekat pada sebuah pemerintahan dalam rangka mencapai apa yang diharapkan sehingga hubungan yang baik dengan masyarakat dapat dirasakan. Pemerintah tentunya dari sejak dahulu kala telah menjalankan ataupun merencanakan program-program dalam rangka adanya pembangunan nasional baik jangka panjang ataupun jangka pendek. Demikian halnya pemerintah kota Manado yang terus berpacu dengan waktu untuk menjalankan roda pemerintahannya, walaupun terkadang banyak kendala yang dihadapi untuk menjalankan program kerja mereka. Dan perubahan demi perubahan juga dilakukan sehingga pencapaian hasil program dapat terealisasi.

Kebijakan dibuat tentunya melalui beberapa tahap, selanjutnya sampai pada implementasi kebijakan tersebut. Implementasi dari kebijakan tersebut adalah praktek dari pemerintah yang diberikan untuk tujuan bagi masyarakat. Maka yang dituntut dari pemerintah saat ini adalah beberapa prinsip *good governance* seperti yang telah disebutkan diatas. Dalam penelitian ini beberapa prinsip *good governance* yakni akuntabilitas dan transparansi menjadi dua pilihan dari peneliti untuk diangkat dalam penelitian ini. Akuntabilitas ternyata dipandang sangat perlu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mengapa demikian karena seperti yang telah disebutkan diatas bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat maka hal tersebut sangat dibutuhkan, guna menghilangkan patologi

birokrasi seperti yang kita ketahui yaitu KKN dan sebagainya.

Prinsip akuntabilitas mengharuskan pemerintah menata seluruh pelayanannya dengan sebaik-baiknya karena merupakan salah satu prinsip yang harus dilaksanakan secara utuh oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Demikian juga dengan transparansi dimana memiliki aspek pendukung pada prinsip *good governance* untuk dilaksanakan oleh pemerintah.

Instruksi presiden RI no. 5 tahun 2003 tentang paket kebijakan ekonomi menjelang dan sesudah berakhirnya Program Kerjasama dengan International Monetary Fund (IMF), mengintruksikan antara lain kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara untuk melakukan langkah-langkah dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan masyarakat terutama yang menyangkut kepastian prosedur, waktu dan pembiayaan pelayanan public. Selain itu, untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas, transparan dan akuntabel antara lain telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN./7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Namun demikian transparansi dan akuntabilitas yang merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan secara utuh oleh setiap instansi dan unit pelayanan instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya belum juga dapat dilaksanakan secara menyeluruh.

Apa yang dikemukakan diatas ternyata jauh dari pemikiran masyarakat pada umumnya, yang memahami bahwa pemerintah lebih mementingkan diri mereka sendiri, tapi ternyata tidak semua masyarakat tahu bahwa pemerintah memiliki landasan mengenai prinsip *good governance* yakni akuntabilitas dan transparansi tersebut. Ternyata ini diharapkan bukan hanya sekedar goresan tinta diatas kertas saja, tapi implementasi dari apa

yang dibuat pemerintah kiranya dapat dirasakan, karena seperti yang dikutip diatas bahwa akuntabilitas dan transparansi belum dilaksanakan secara menyeluruh oleh pemerintah.

Untuk itulah mengapa peneliti lebih menekankan akuntabilitas dan transparansi dari beberapa prinsip *good governance* yang lainnya, karena peneliti berpendapat bahwa akuntabilitas atau pertanggung jawaban diharuskan ada pada setiap instansi untuk memberikan laporan yang akurat dan benar sehingga timbul kepercayaan masyarakat pada pemerintah. selanjutnya transparansi dilihat dari berbagai sisi yakni keterbukaan dimana bukan hanya pemerintah saja yang mengetahui seluk beluk pelaksanaan program yang ada melainkan masyarakat berhak mendapatkan informasi yang terbuka, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu.

Pada era demokratis saat ini ketika para birokrat dituntut untuk memberikan yang terbaik pada masyarakat, maka integritas dari pemimpin dituntut untuk dipertanggungjawabkan. Dengan demikian juga masyarakat harus mempunyai pemimpin yang benar-benar memahami apa yang diinginkan oleh masyarakatnya. Lewat pemerintahlah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat baik ekonomi, social budaya, maupun politik dapat dirasakan oleh masyarakat. Dan seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa *good governance* menjadi kualitas dalam hubungannya antara pemerintah dan masyarakat maka sangat diharapkan apa yang telah diwacanakan tersebut bukan sekedar goresan tinta semata melainkan adanya implementasi.

Sulawesi utara khususnya diKota Manado, *good governance* merupakan strategi awal dari pemerintah Kota Manado dalam rangka tercapainya visi kota Manado. Dalam kaitannya dengan visi kota manado, pemerintah kota mulai mengadakan

pembebenan diberbagi sector guna meghilangkan patologi birokrasi yang selama ini menjadi image buruk dalam pelaksanaan birokrasi. Penerapan *good governance* dalam pemerintahan Pemerintah Kota Manado, secara tidak langsung mempengaruhi dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh pemerintah kota manado yang berorientasi pada tujuan tertentu, juga bersifat otoritatif demi kepentingan seluruh masyarakat.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian maka penelitian ini dilakukan sebagai suatu riset deskriptif yang bersifat eksploratif yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena dan biasanya merupakan penelitian non hipotesis, dengan adanya pendekatan observasi secara langsung yakni pengamatan secara langsung di tempat penelitian tanpa melibatkan peneliti, juga engan adanya penelitian asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variable atau lebih.

B. Operasional Variabel

Berdasarkan perumusan masalahan , yang menjadi focus penelitian adalah pengaruh dari *good governance* terhadap adanya implementasi kebijakan tata kota yang ada di kota Manado, maka dapat didefinisikan secara operasional sebagai berikut:

1. Variabel *good governance* adalah prinsip-prinsip yang mendasari adanya kinerja pemerintahan yang memiliki pengaruh terhadap implementasi kebijakan dari permasalahan yang telah dikemukakan. sesuai dengan rumusan masalah dapat dilihat beberapa hal sebagai berikut :

- a. transparansi untuk adanya informasi yang jelas dari pembuat kebijakan atau pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, dengan adanya informasi seluruh proses pemerintahan dapat

diketahui oleh semua elemen dan dapat dipahami. Transparansi dapat diukur dari indikator atau kriteria-kriteria sebagai berikut : Pemerintah menjamin masyarakat untuk mendapat kepercayaan lebih, masyarakat memperoleh kemudahan untuk mendapatkan informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu, keterbukaan pemerintah dalam memberikan layanan informasi

- b. akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pemerintah terhadap apa yang telah dilakukan. Akuntabilitas dapat diukur dari beberapa indikator sebagai berikut : adanya peningkatan kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah, adanya pengurangan kasus-kasus kolusi dan nepotisme
2. Variabel implementasi kebijakan adalah tindakan yang telah dilaksanakan pemerintah untuk tujuan tertentu yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Implementasi kebijakan dapat diukur dari beberapa indikator yaitu dilihat dari : efisiensi dan efektivitas

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah para aparatur pemerintah di Dinas Tata Kota Manado dengan mengambil semua karakteristik yang ada pada dinas tata kota Manado diantaranya dapat dilihat dari tingkat pendidikan, pangkat, golongan, dan jenis kelamin. Berdasarkan data sekunder yang diperoleh bahwa jumlah aparatur pada dinas tata kota adalah sebanyak 63 orang dan untuk menghindari adanya subjektivitas terhadap variabel dalam penelitian ini, maka peneliti melibatkan konsumen dalam hal ini masyarakat sebanyak 12 orang sehingga jumlah seluruhnya menjadi 75 orang

D. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Pengambilan sumber data yaitu informal dengan teknik disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel, bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional

Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan instrumen dan teknik pengumpulan data sebagai berikut : Kuesioner, wawancara, observasi

E. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Analisis statistik deskriptif, adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul, melalui tahap-tahap : data yang terkumpul diklasifikasikan ke dalam tiga kategori (baik, cukup, rendah), data yang terkumpul kemudian dipisahkan menurut kategorinya selanjutnya digambarkan dengan kalimat, data yang terkumpul diklasifikasikan sehingga merupakan suatu susunan urut data, selanjutnya dibuat tabel dan di hitung persentasenya.
2. Analisis statistik inferensial sering juga disebut statistik induktif atau statistik probabilitas, adalah teknik yang digunakan untuk mengukur data sampel, dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil penelitian

a. Variabel good governance

Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel good governance sebanyak 10 item pertanyaan, memiliki

5 alternatif pilihan jawaban dengan skor 1 sampai dengan 5. Tota skor maximum 50 dan total skor minimum adalah 10.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dari 75 responden dalam penelitian sebanyak 49 responden (65.33%) menyatakan bahwa pelaksanaan good governance berada pada kategori tinggi. Sebanyak 25 (33.33%) responden berada pada kategori sedang, dan 1(1.34%) responden yang menyatakan bahwa good governance berada pada kategori rendah.

Berdasarkan deskripsi data tersebut, ternyata sebagian besar responden yaitu memberikan penilaian terhadap penerapan good governance dalam penyelenggaraan organisasi sudah tinggi. Data tersebut memberi pengertian bahwa penyelenggaraan atau manajemen pemerintahan pada Dinas Tata Kota Manado sudah menggunakan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

b. Variable implementasi kebijakan

Instrumen yang digunakan untuk mengukur implementasi kebijakan sebanyak 10 item pertanyaan, memiliki 5 alternatif pilihan jawaban dengan skor 1 sampai dengan 5. Tota skor maximum 50 dan total skor minimum adalah 10.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 75 responden dalam penelitian sebanyak 17 responden (22.67%) menyatakan bahwa implementasi kebijakan berada pada kategori tinggi. Sebanyak 44 (58.67%) responden berada pada kategori sedang, dan 14(18.66%) responden yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan berada pada kategori rendah.

Berdasarkan deskripsi data tersebut, ternyata sebagian besar responden yaitu memberikan penilaian terhadap implementasi kebijakan masih berada pada kategori sedang atau cukup baik. Hal itu dapat diartikan efisiensi dan efektivitas dalam implementasi kebijakan pada Dinas Tata Kota Manado belum sepenuhnya terpenuhi.

Untuk mengetahui besarnya pengaruh good governance terhadap implementasi kebijakan menggunakan nilai koefisien determinasi. Hasil perhitungan persamaan regresi linier sederhana diperoleh persamaan $Y = 23.036 + 0.377X$. persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta Y sebesar 23.036, artinya jika tidak menggunakan atau menerapkan good governance dapat dijelaskan bahwa penerapan good governance dinaikkan sebesar satu satuan atau 100%, maka akan terjadi peningkatan keberhasilan implementasi kebijakan sebesar nilai koefisien regresi yaitu 0.377 atau 37,7%.

Nilai koefisien regresi jika disilangkan dengan nilai harapan tertinggi dari variable good governance maka diperoleh hasil : $Y = 23.036 + 0.377(50) = 41.886$. hasil perhitungan tersebut mengindikasikan prediksi variable good governance yang dibatasi pada indicator transparansi dan akuntabilitas terhadap implementasi kebijakan sebesar 41.886. artinya, jika penerapan good governance ditingkatkan sampai sebesar 50 atau 100% sesuai nilai harapan, maka secara keseluruhan implementasi kebijakan akan mengalami peningkatan sampai pada angka nilai 41.886.

Untuk mengetahui signifikansi pengaruh variable good governance

terhadap variable implementasi kebijakan dapat dilakukan dengan menggunakan uji t. diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3.775. Besarnya nilai t_{tabel} yang diperoleh pada derajat kebebasan 73 sebesar 1.671. berarti nilai t_{hitung} $3.775 >$ nilai t_{tabel} 1.671. atau dapat dilihat pada nilai signifikansi pengaruh sebesar $0.000 <$ alfa 0.05. perhitungan tersebut menunjukkan bahwa variable good governance berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap variable implementasi kebijakan pada taraf kepercayaan 95%.

2. Pembahasan

Dengan menggunakan metode analisis regresi linier sederhana menunjukkan bahwa koefisien determinasi variable variable good governance terhadap variable implementasi kebijakan hanya sebesar 16.3% dengan probabilitas kesalahan 0.000. Walaupun kecil derajat determinasi good governance terhadap implementasi kebijakan namun pengaruh tersebut sangat signifikan. Hasil analisis regresi tersebut memberi arti bahwa hipotesis nol yang menyatakan bahwa good governance tidak berpengaruh tersebut sangat signifikan. Hasil analisis regresi tersebut memberi arti bahwa hipotesis nol yang menyatakan bahwa good governance tidak terpengaruh terhadap implementasi kebijakan di tolak. Dengan demikian, hipotesis alternative yang menyatakan bahwa good governance berpengaruh terhadap implementasi kebijakan secara positif dan signifikan di Dinas Tata Kota Manado diterima pada taraf signifikansi 95%. Artinya, implementasi kebijakan di Dinas Tata Kota Manado yang menekankan pada aspek efisiensi dan efektifitas sudah mulai memperhatikan bahkan menggunakan pendekatan good governance dalam pengelolaan roda organisasi.

Hasil penelitian ini nampaknya mendukung pendapat dari Widodo(2001) yang

mengemukakan bahwa good governance diwujudkan sebagai pemerintahan yang pada hakikatnya ialah melakukan pelayanan kepada masyarakat bukan pelayanan kepada diri sendiri. Pemerintahan yang baik yaitu melayani serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya dalam mencapai tujuan bersama. Kondisi sebagaimana disebutkan tersebut merupakan perwujudan adanya pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari paradigma rule governance menjadi good governance. Pergeseran paradigma tersebut mengkondisikan penyelenggaraan pemerintahan tidak lagi semata-mata dilakukan oleh pemerintah dan bersandar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun sudah melibatkan seluruh elemen yang ada baik di dalam tubuh birokrasi pemerintah maupun elemen yang berada di luar tubuh birokrasi pemerintah.

Hasil penelitian yang mengindikasikan pengaruh penerapan pendekatan good governance secara positif dan signifikan terhadap implementasi kebijakan. Hasil penelitian tersebut memberi pengertian bahwa good governance yang diterjemahkan sebagai pemerintahan yang baik dalam implementasi kebijakan harus diperhatikan semaksimal mungkin. Transparansi dan akuntabilitas sebagai perwujudan dari pemerintahan yang baik harus diberlakukan secara berkesinambungan dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk di dalamnya implementasi kebijakan.

Sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik di di Dinas Tata Kota Manado belum sepenuhnya mempengaruhi implementasi kebijakan. Hal itu menggambarkan bahwa perhatian terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus ditingkatkan. Hasil analisis prediksi

menunjukkan good governance memiliki peran yang sangat signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Artinya, efisiensi dan efektifitas dalam implementasi kebijakan dapat diwujudkan apabila transparansi dan akuntabilitas ditingkatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dwiyanto (2006) mengemukakan bahwa jika tidak adanya transparansi dalam birokrasi pelayanan public, maka banyak masyarakat yang akan mengalami frustrasi. Salah satu indikasi tidak adanya transparansi dalam birokrasi pelayanan public ialah factor komunikasi tidak efektif. Pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa terciptanya komunikasi efektif dalam birokrasi pelayanan public menggambarkan adanya transparansi dalam birokrasi tersebut. ternyata komunikasi merupakan factor yang sangat penting dalam mewujudkan transparansi birokrasi pelayanan kepada masyarakat.

Akuntabilitas merupakan faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Widodo (2001) berpendapat bahwa birokrasi pelayanan kepada masyarakat tidak hanya sekedar bertindak netral terhadap partai politik atau golongan tertentu, namun yang paling penting ialah harus bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi sikap, perilaku maupun sepak terjang para pelayan public. Sasaran pertanggung jawaban semua tugas dan kewenangan ialah kepada masyarakat. Alasannya bahwa semua organisasi pemerintah dibuat oleh public dan untuk public, siapapun pelaku organisasi pemerintah harus bertanggung jawab kepada public juga. publik yang akan melakukan penilaian terhadap apa yang dipertanggung jawabkan tersebut.

Maka demikian dapat ditegaskan bahwa akuntabilitas merupakan suatu kewajiban seseorang pelayan public atau suatu lembaga pelayanan public untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan muladari perencanaan,

pelaksanaan sampai pada pengendalian semua sumber daya yang digunakan yang telah dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan secara langsung atau tidak langsung menggunakan media pertanggung jawaban yang tersedia secara periodic. Semakin kompleks tugas dan kewenangan yang dimiliki seseorang maupun lembaga dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, maka semakin tinggi tuntutan atau kewajiban untuk melakukan pertanggung jawaban.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara deskriptif, good governance yang diamati dari aspek transparansi dan akuntabilitas secara umum telah diterapkan dalam penyelenggaraan organisasi Dinas Tata Kota Manado namun belum sepenuhnya diterapkan dengan baik
2. Rata-rata implementasi kebijakan yang diamati dari aspek efisiensi dan efektifitas masih berada pada kategori sedang. Artinya, pelaksanaan kebijakan belum berlangsung dengan baik karena belum sepenuhnya efisien dan efektif.
3. Good governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi kebijakan di Dinas Tata Kota Manado walaupun pengaruhnya masih pada kategori rendah. Hal itu disebabkan penerapan good governance belum mengikuti makna yang terkandung dalam prinsip-prinsip yang dianut.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan dalam penelitian ini, maka dapat disarankan sebagai berikut :

1. Harus diakui bahwa Dinas Tata Kota Manado telah menerapkan pendekatan good governance dalam pengelolaan

organisasi sebagaimana ditunjukkan dalam hasil penelitian ini. Penerapan good governance perlu dipertahankan intensitasnya namun harus diterpkan dengan baik sesuai dengan situasi dan kondisi organisasi secara keselurahn.

2. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan di Dinas Tata Kota Manado masih berada pada kategori cukup baik. Oleh karena itu disarankan kepada pimpinan agar memprhatikan aspek efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan kebijakan.
3. Pengaruh yang ditunjukkan good governance terhadap implentasi kebijakan walaupun positif da signifikan namun pengaruhnya rendah. Hal itu disarankan agar penerapannya jangan hanya sekedr mengikuti perkembangan di mana good governance sedang hangat dibicarakan, akan tetapi benar-benar menerapkannya sesuai dengan makna yang dikandung dalam prinsip-prinsip tersebut dan sesuai dengan tuntutan organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono. 2003. Metodologi Penelitian Administrasi. Bandung : C.V Alfabeta
- Widodo, Joko. 2001 Good Governace. Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Surabaya : Insan Cendekia
- Dwiyanto , Agus. Dkk. 2006. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Cetakan kedua. Yogyakarta : Gadjah Mada UniversityPress
- Sumber Lainnya :
- Instruksi Presiden RI NO. 5 tahun 2003 tentang paket kebijakan ekonomi menjelang dan sesudah berakhirnya Program Kerjasama dengan International Monetary Fund (IMF),
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/ KEP/ M.PAN./7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.